# BAB V

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

# 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa posisi strategis utama kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berada pada kuadran I, yaitu strategi agresif dengan menerapkan strategi SO (Strenght-Opportunity). Hal ini menunjukkan bahwa dengan dukungan komitmen pimpinan yang tinggi, pelatihan atau bimtek untuk seluruh stakeholders dalam bidang keuangan di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone Bolango serta kerjasama yang baik antar pihak pengelola keuangan daerah dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK saat ini yang begitu pesat maka sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat diterapkan. Selain itu, kelemahan internal terdapat pada pemahaman aparat yang masih rendah dan sebagian aparat pengelola keuangan tidak memiliki pendidikan yang berlatar belakang akuntansi, namun mereka dianggap mampu untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dengan bimtek yang telah dilakukan.

#### 1.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang paling luas terdapat pada kuadran pertama dengan luas 11,055 yang berarti bahwa strstegi SO (agresif) merupakan kunci keberhasilan yang prioritas sedangkan daerah yang paling sempit terdapat pada kuadran keempat dengan luas 7,435 yang

berarti bahwa strategi yang dapat diterapkan yaitu strategi defensif. Untuk itu penulis menyarankan beberapa strategi prioritas (strategi SO) yakni:

- a. Perekrutan pegawai bagian keuangan yang berlatar belakang akuntansi.
- b. Pemberian reward bagi pegawai bagian keuangan yang memiliki kinerja baik.
- c. Pembekalan kemampuan dibidang keuangan dan kemampuan dibidang IPTEK

Sedangkan strategi alternatif dari penerapan sistem akuntansi pemerintah basis akrual ini adalah strategi ST, WO dan WT.

Selanjutnya penulis menyarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek penelitian yang terdiri dari beberapa daerah dan juga dapat menggunakan metodologi lainnya untuk memperkaya hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhar, 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh, *Tesis*, Medan.
- Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta, Prenada Media Group.
- BPK, RI. 2015. Penyampaian LHP BPK RI Atas LKPD TA 2014: BPK RI Memberikan Opini WTP Untuk Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016, dari www.bonebolango.bpk.go.id
- Creswell, 2011. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. and Vicki L. Plano Clark (2008). *Designing and conducting Mixed Methods Research*. London: Sage Publications.
- Dora Sofia, 2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Fahmi, Irham. 2011. Manajemen Teori, Kasus Dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Faradilah Andi, 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010). Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Bandung: Salemba Empat.
- Herlina, Hetti 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Jogiyanto, 2005. Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: Andi Offset,
- Kusuma Setiawati Ririz, 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, 2012. Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara) *Jurnal Akuntansi volume XVI No.03, Universitas Tadulako, Palu.*
- Sofyandi, Herman. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Setyaningsih, Titik. 2012. "Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Terhadap standar Akuntansi Berbasis Akrual (Studi di Pemerintah Kota Surakarta) *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Yeremias T. Keban, 2004, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Gava Media
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Warisno. 2008. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi". *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan.